

Pendidikan Gila Gelar?

**Pemikiran Julian Nida-Rümelin tentang “Kegilaan Akademisasi”
(*Akademisierungswahn*) di Uni Eropa dan Amerika Serikat serta
Arti Pentingnya untuk Keadaan Indonesia**

Oleh Reza A.A Wattimena

*Peneliti, Doktor dari Hochschule für Philosophie München,
Philosophische Fakultät SJ München, Jerman*

Abstrak

Tulisan ini ingin menjabarkan beberapa argumen penting dari Julian Nida-Rümelin terkait dengan kegilaan akademisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta menunjukkan arti pentingnya bagi keadaan di Indonesia. Kegilaan akademisasi ini tampak jelas pada obsesi masyarakat luas dan pemerintah terhadap gelar akademik, serta melupakan unsur pendidikan lainnya, yakni pendidikan yang berfokus langsung pada keterampilan kerja. Ini terjadi, karena kesalahpahaman pemerintah dan masyarakat luas tentang arti pendidikan, serta kesalahpahaman tentang hubungan antara kebijakan politik pendidikan dengan keadaan ekonomi nyata di lapangan. Nida-Rümelin menawarkan analisis terhadap hal ini, sekaligus jalan keluar dari permasalahan pendidikan yang terjadi, yakni dalam bentuk pengakuan kesetaraan antara dual pendidikan keterampilan kerja di satu sisi, dan pendidikan akademik di sisi lain. Keduanya tetap didasarkan pada pandangan filosofis tentang pendidikan sebagai pengembangan kepribadian. Beberapa relevansi atas argumen ini terhadap keadaan Indonesia, beserta dengan tanggapan kritis atasnya, juga akan diberikan di dalam tulisan ini.

Kata-kata kunci: Kegilaan Akademisasi, Ideologi Pendidikan, Pendidikan Akademik, Pendidikan Keterampilan Kerja, Pengembangan Kepribadian

Abstract

This writing describes several important arguments from Julian Nida-Rümelin concerning academisation madness, which happens in United States and European Union. It shows also the relevance of this argument for Indonesia. This academisation madness can be seen clearly in the obsession of academic title as a result of university education. At the same time, the skilled labor education that is created specifically for certain line of jobs is being forgotten or underestimated. This madness happens, because of the misunderstanding of the society and government concerning the true meaning of education, and how educational policies have direct social, political and economic consequences in reality. Nida-Rümelin provides a deep analysis concerning this matter. He argues also about the importance of government and public wide recognition on the value of skilled education in comparison with academic education. Both have different focus but possess the same philosophical paradigm, namely education as personality development. This article offers also several critical considerations to Nida-Rümelin's arguments.

Key Words: Academisation Madness, Education Ideology, Academic Education, Skilled Labour Education, Personality Development

Pendidikan telah disempitkan menjadi semata pengejaran gelar. Beragam informasi dihafalkan, lalu dimuntahkan ulang dalam berbagai ujian, supaya bisa mendapatkan gelar. Gelar akademik ini lalu dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta karir yang gemilang. Pola semacam ini telah membentuk semacam kegilaan akademik dan kehausan gelar yang buta, tidak hanya di dunia pendidikan Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga di Indonesia.

Padahal, beragam penelitian dan data menunjukkan, bahwa gelar akademik tidak merupakan jaminan keberhasilan, dan juga tidak secara langsung menciptakan kemakmuran di tingkat nasional. Dengan kata lain, pendidikan sebagai pengejaran gelar sungguh merupakan kegilaan (*Wahn*) yang tidak memiliki faedah. Yang diperlukan adalah pemahaman yang mendalam tentang arti pendidikan yang sesungguhnya, terutama dalam konteks perumusan kebijakan politik di bidang pendidikan yang terkait erat dengan bidang-bidang lainnya di masyarakat, seperti bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Julian Nida-Rümelin, filsuf dan mantan menteri kebudayaan Jerman, menawarkan beberapa argumen penting terkait dengan hal ini.

Untuk menjabarkan, menanggapi serta melihat arti penting pemikirannya, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. *Pertama*, tulisan ini akan membahas pemikiran Nida-Rümelin tentang kegilaan akademik yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama di Jerman, Swiss, Austria dan Inggris. *Dua*, tulisan ini juga akan melihat arti penting diskusi tentang kebijakan pendidikan tersebut bagi Indonesia, serta mengajukan beberapa tanggapan kritis terhadap beberapa argumen utama Nida-Rümelin. *Tiga*, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

Kegilaan Akademik dan Upaya Melampauinya

Bersama dengan Jürgen Habermas dan Peter Sloterdijk, Julian Nida-Rümelin adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh di Jerman sekarang ini.¹ Ia telah menulis banyak buku, dan menjadi acuan dalam berbagai persoalan politik, ekonomi dan etika di abad 21 ini. Ia juga banyak berbicara dan menulis soal pendidikan. Salah satu bukunya, yang berjudul *Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie*, menjadi acuan debat publik di Jerman terkait dengan hubungan antara ekonomi dan etika. Pada 2013 lalu, ia menerbitkan buku dengan judul *Philosophie einer humanen Bildung*. Buku ini mengupas pandangannya

¹ Tulisan ini mengacu pada uraian (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

tentang pendidikan humanis yang mulai menghilang dari dunia pendidikan Eropa. Pada 2015 lalu, ia melanjutkan keterlibatannya di bidang pendidikan dengan menerbitkan buku *Der Akademisierungswahn: Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung*. Buku inilah yang menjadi acuan utama di dalam tulisan ini. Di samping itu, ia juga menulis buku bersama ilmuwan pendidikan Jerman, Klaus Zierer, dengan judul *Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten*.²

Sekarang, ia mengajar filsafat dan teori politik di Universitas Ludwig Maximilien Munich, Jerman. Di samping itu, ia juga memimpin beberapa organisasi, seperti Pusat Kompetensi Etika Munich, dan program pasca sarjana di universitas yang sama dalam bidang Filsafat, Politik dan Ekonomi. Nida-Rümelin juga memegang jabatan di universitas maupun organisasi lain, seperti profesor tamu sekaligus *Doktor Honoris Causa* dari Universitas Humboldt di Berlin, Jerman, anggota terhormat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin-Brandenburg, Akademi Ilmu Pengetahuan dan Seni Eropa serta anggota dari Akademi Etika di dalam Kedokteran. Dari 1998 sampai 2002, Nida-Rümelin aktif di dalam politik sebagai Koordinator Kebudayaan di Munich, dan Menteri Kebudayaan Jerman pada kabinet pimpinan Gerhard Schroeder.

Apa peran filsafat di masa sekarang ini, terutama ketika berbicara soal pendidikan? Sejak berkurangnya peran agama di dalam kehidupan publik di masyarakat Eropa, filsafat dijadikan sandaran untuk membuat penilaian baik atau buruk di dalam beragam pembuatan keputusan. Yang dijadikan sandaran utama filsafat bukanlah iman pada seperangkat ajaran agama tertentu, melainkan pada akal budi manusia. Dengan demikian, sebuah pengetahuan ataupun keputusan haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara rasional di hadapan akal budi yang melampaui batas-batas agama, ras, etnik maupun bangsa.

Akal budi itulah yang bisa membantu manusia untuk memperoleh kejernihan di dalam memahami beragam tantangan yang muncul di abad 21 ini, termasuk dalam soal pendidikan. Kejernihan ini juga penting di dalam melakukan refleksi atas apa yang sebelumnya telah dilakukan, supaya pengalaman masa lalu bisa menjadi pelajaran, dan kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Untuk itu, filsafat memerlukan jarak dari beragam bidang lainnya di dalam kehidupan, dan menjadi daya pendorong perubahan ke arah yang lebih baik.³

Jarak diperlukan, supaya kejernihan bisa diperoleh. Di dalam pembicaraan publik terkait dengan pendidikan, jarak amatlah diperlukan, supaya filsafat bisa menawarkan

² Lihat *ibid.*

³ Lihat (Wattimena, Filsafat sebagai Revolusi Hidup, 2015)

pemikiran jernih dan kritis. Yang menjadi musuh disini bukanlah institusi pendidikan ataupun praktek pendidikan secara umum, melainkan ideologi pendidikan yang tidak manusiawi. Dalam arti ini, ideologi adalah kesalahan berpikir tentang dunia yang kemudian diyakini sebagai kebenaran.⁴ Dalam ranah teori-teori Marxis, ideologi juga dipahami sebagai kesadaran palsu.⁵ Di dalam pendidikan bercokol ideologi semacam ini yang sudah berjalan puluhan tahun, baik di Eropa secara umum, maupun di Jerman secara khusus. Ideologi pendidikan (*Bildungsideologie*) ini disebut Nida-Rümelin sebagai ideologi kegilaan akademik (*Akademisierungswahn*).

Intinya adalah kecenderungan masyarakat secara umum untuk meninggalkan lapangan pekerjaan keterampilan (*Berufsausbildung*), demi mengejar gelar akademik di universitas.⁶ Yang akhirnya terjadi adalah meningkatnya jumlah mahasiswa yang putus studi di universitas. Sementara, jumlah pekerja trampil, yang sesungguhnya amat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, justru semakin sulit dicari. Pola kegilaan akademik ini terjadi di Eropa, dan juga di Indonesia, karena mengikuti pola yang berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. Di AS, orang mesti melanjutkan pendidikan ke tingkat *college*, jika ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Ijazah SMU hanya akan membawa orang pada pekerjaan dengan penghasilan rendah. Pola ini tidak berjalan baik, karena banyak orang berpendidikan *college* justru menjadi pengangguran. Ideologi semacam inilah yang kemudian diterapkan di Eropa dan juga di Indonesia.⁷

Di dalam sistem pendidikan AS dan Inggris, sebagaimana dijelaskan oleh Nida-Rümelin, jika orang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat *college*, maka ia hanya memiliki satu ijazah, yakni ijazah SMU. Tidak ada pendidikan lebih jauh yang memberikan keterampilan padanya, sehingga ia bisa bekerja dengan pendapatan yang layak. Jika mereka dipaksa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat *college*, maka itu akan membutuhkan biaya amat tinggi. Pendidikan di tingkat ini juga membutuhkan kemampuan berpikir abstrak dan melakukan penelitian ilmiah yang cukup tinggi. Tidak semua orang memilikinya. Banyak orang terampil di dalam berbagai bidang, namun tak memiliki kemampuan berpikir abstrak maupun melakukan penelitian ilmiah. Ironisnya, pola pendidikan yang salah kaprah ini justru

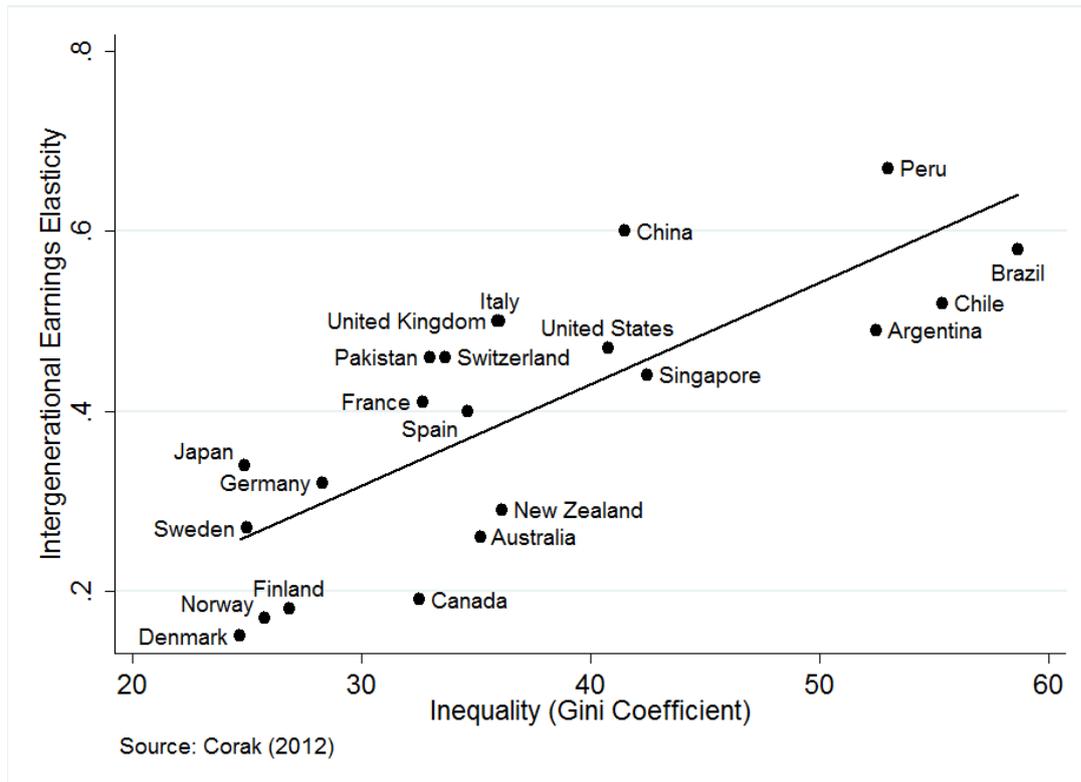
⁴ Pemahaman lain soal ideologi lihat (Žižek, 1989)

⁵ Lihat (Hardiman, 1988)

⁶ Bdk (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

⁷ Lihat (Nida-Rümelin, *Philosophie einer humanen Bildung*, 2013)

menjadi trend internasional, dan diikuti oleh banyak negara, termasuk Indonesia, Jerman, Swiss dan Austria.⁸



Salah satu tanda kemajuan sebuah negara adalah mobilitas sosial, atau yang banyak dikenal sebagai peningkatan status sosial ekonomi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Kebijakan ekonomi, politik dan pendidikan yang tepat akan mengantarkan sebuah generasi menuju kemakmuran lebih dari generasi sebelumnya. Jelaslah bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam hal ini. Di dalam grafik ditunjukkan kesenjangan sosial antara generasi yang sekarang dengan generasi sebelumnya, atau yang banyak disebut sebagai elastisitas pendapatan antar generasi. Negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Norwegia, Finlandia dan Swedia, menempati urutan pertama dalam soal ini. Artinya, generasi yang sekarang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, daripada generasi sebelumnya. Ini merupakan hasil dari kebijakan politik, ekonomi dan pendidikan yang jitu dari pemerintah mereka. Sementara, Peru, Brasil dan Chile memiliki elastisitas pendapatan antar generasi

⁸ Lihat (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

yang rendah. Artinya, ketiga negara tersebut mengalami penurunan tingkat pendapatan, atau tetap, di generasi berikutnya. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antar generasi pun menjadi tinggi.⁹

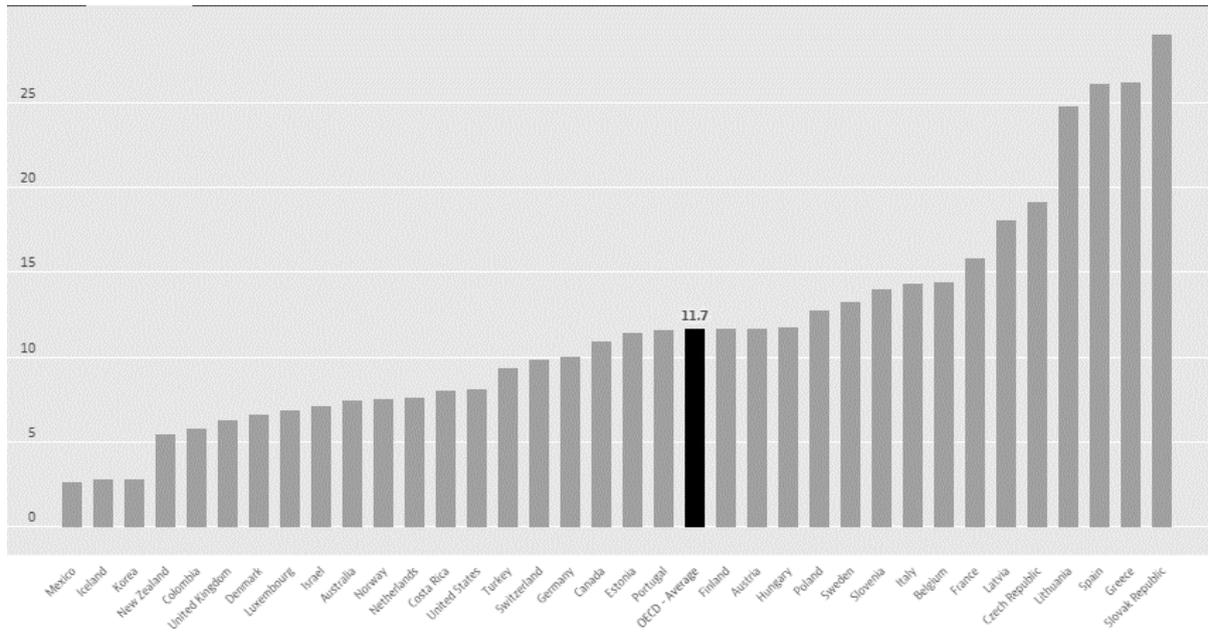
Di dalam dunia pendidikan sekarang ini, terutama yang sudah terkena dampak langsung dari globalisasi, ada sebuah kesalahan berpikir mendasar. Nida-Rümelin menyebutnya sebagai “kesalahan berpikir ekonomi pendidikan” (*bildungsökonomischer Denkfehler*). Intinya begini. Ketika seseorang yang bergelar sarjana lulusan perguruan tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi, daripada yang tidak bergelar, maka dianggap, bahwa mereka memiliki sumbangan lebih besar di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Juga, jika gelar akademik dianggap lebih gampang dapat pekerjaan, maka orang-orang yang bergelar akademik dianggap berperan lebih penting di dalam perkembangan ekonomi, daripada orang-orang yang tidak bergelar. Anggapan dasarnya adalah, bahwa semakin banyak orang bergelar akademik di suatu negara, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktanya tidak seperti itu.

Contoh konkret dapat diambil di Jerman terkait dengan pekerjaan sebagai pemasang listrik di bangunan pencakar langit. Dahulu, pekerjaan ini diisi oleh tukang listrik lulusan sekolah pelatihan listrik (*Ausbildung*), dan bukan lulusan universitas. Profesi tukang listrik ini tersertifikasi dan diakui secara nasional oleh pemerintah. Semua berjalan lancar. Mutu pemasangan baik, dan orang bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Namun, kini jumlah tukang listrik berkurang. Banyak siswa lebih tertarik belajar di universitas menjadi seorang Sarjana Teknik Elektro, supaya bisa mendapatkan gaji lebih tinggi. Akhirnya, para sarjana lulusan universitas ini mengisi pekerjaan tukang listrik tersebut. Mutunya tetap, namun jumlah gaji yang diberikan bertambah, semata karena gelar Sarjana Teknik tersebut. Bukankah ini justru pemborosan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional? Mutu yang sama, namun dikerjakan oleh orang-orang yang menuntut bayaran lebih tinggi.

Ketika jumlah sarjana semakin bertambah, sementara uang untuk menggaji mereka semakin berkurang, maka lapangan kerja pun semakin sempit. Ketika lapangan kerja berkurang, maka pengangguran juga bertambah, terutama pengangguran yang berpendidikan, yakni pengangguran lulusan universitas. “Kesalahan berpikir ekonomi pendidikan” ini menunjukkan dengan jelas, bahwa bertambahnya jumlah orang yang bergelar akademik tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi sebuah masyarakat. Sebaliknya, peningkatan

⁹ Lihat (The Economics of the Great Gatsby Curve: a picture is worth a thousand words, 2012)

jumlah orang yang bergelar akademik bisa mendorong terciptanya pengangguran, akibat berkurangnya uang yang bisa diputar, guna menciptakan lapangan kerja.



Data berikut menunjukkan data pengangguran terdidik (bergelar) dari usia 25-64 tahun pada 2016 di beberapa negara. Peringkat tertinggi diraih oleh Meksiko dan Islandia dengan sekitar 2,7 %.¹⁰ Sementara, negara dengan jumlah pengangguran terdidik terbanyak adalah Republik Slovakia dan Yunani. Di Yunani, lebih dari 25 % orang yang berusia 25-64 tahun tidak memiliki pekerjaan. Di Slovakia, jumlahnya bahkan hampir menyentuh 30%. Dari total keseluruhan negara di atas, rata-rata pengangguran terdidik di setiap negara adalah 11,7% dari jumlah populasi yang berusia 25 sampai dengan 64 tahun.

Apa arti penting data terkait dengan pengangguran muda berpendidikan? Data ini menunjukkan berhasil tidaknya sebuah negara menjalankan politik pendidikan yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tentu saja, pendidikan yang sejati berjalan seumur hidup, dan tidak hanya berhenti, ketika orang sudah mendapatkan ijazah kelulusan semata. Ketika politik pendidikan ditata sedemikian rupa, sehingga terhubung erat dengan pemenuhan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional, maka ini menunjukkan, bahwa proses belajar sungguh berlangsung secara berkelanjutan, dan pemerintah negara tersebut berhasil menjalankan politik pendidikannya yang terhubung

¹⁰ Data diperoleh dari (OECD Data, 2016)

dengan berbagai kebijakan lainnya. Sebaliknya, ketika politik pendidikan sebuah negara tidak sejalan dengan rencana pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka ini menunjukkan adanya kegagalan kebijakan. Buahnya adalah pengangguran yang kemudian berujung pada beragam permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan, kriminalitas, tersebarnya penyakit, radikalisme, terorisme dan sebagainya.

Jerman, Austria dan Swiss sebenarnya sudah menemukan cara, guna menghadapi masalah ini, yakni dengan kebijakan pendidikan dua sistem. Di dalam model kebijakan ini, seperti sudah disinggung sebelumnya, ketika lulus SMU, setiap siswa bisa memilih, apakah mereka akan melanjutkan ke universitas, atau menempuh pendidikan keterampilan profesional yang disertifikasi oleh negara, sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Bagi mereka yang memiliki kemampuan berpikir abstrak, jalur universitas sangat disarankan. Bagi mereka yang memiliki keterampilan, minat dan bakat di satu bidang tertentu, jalur pendidikan profesional tersertifikasi pemerintah amatlah disarankan. Pola ini telah memberikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara tersebut. Lapangan kerja terisi tenaga kerja bermutu. Tingkat pengangguran rendah. Tingkat putus studi setelah SMU juga rendah, serta Universitas mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang memang berminat dan berbakat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹

Tentu saja, sangatlah sulit untuk menerapkan sistem ini di negara-negara lain. Sistem ini membutuhkan dua hal, yakni budaya sekaligus institusi yang bisa menopangnya. Budaya menyangkut kepercayaan antara sistem pelatihan keterampilan yang ada dengan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. Sementara, institusi menyangkut pembinaan tenaga kerja, supaya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Walaupun begitu, di Jerman, Austria dan Swiss, pola ini pun mulai berkurang. Pendidikan di universitas dengan gelar akademiknya dianggap lebih berharga, daripada pendidikan yang berpijak pada keterampilan. Ini merupakan salah dampak dari globalisasi di bidang pendidikan yang justru menggoyang sistem-sistem pendidikan yang telah mapan dan berhasil sebelumnya. Sayangnya, ketika globalisasi pendidikan ini diikuti tanpa sikap kritis, jumlah pengangguran muda terdidik justru bertambah, dan beban ekonomi nasional justru semakin besar, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Pola pendidikan yang berpusat pada

¹¹ Lihat (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

gelar sebagai buah dari globalisasi pendidikan inilah yang perlu terus ditanggapi secara kritis.¹²

Dengan demikian, pembagian sistem pendidikan ke dalam dua bentuk di atas amatlah penting. Buktinya adalah tiga hal. Pertama terkait dengan tingkat pengangguran di negara tersebut. Kedua terkait dengan mutu dan tingkat kelulusan di perguruan tinggi. Tiga terkait dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tenaga kerja terampil, guna menunjang perkembangan industri. Dalam arti ini, bentuk sistem pendidikan Amerika Serikat dan Inggris bermutu amat rendah. Sementara, bentuk sistem pendidikan Jerman, Austria dan Swiss bisa menjadi contoh yang baik bagi Indonesia. Model dua bentuk sistem pendidikan ini juga amat bagus secara teoritis, karena memberi ruang bagi peserta didik untuk menjalani hidup serta bekerja sesuai dengan bakat maupun minat yang ia punya, tanpa harus mengorbankan kepribadian mereka demi mengikuti keinginan pasar.



Di beberapa negara Asia, ada anggapan, bahwa orang tidak boleh menikah, sebelum ia memiliki gelar sarjana. Sebagian orang di Indonesia sudah memeluk pandangan ini. Sebagian lagi belum. Tentu saja, dilihat sekilas, pandangan ini mengandung nilai yang penting. Namun, di dalamnya terkandung pula kesalahpahaman tentang inti pendidikan yang bisa membawa petaka bagi keadaan ekonomi maupun politik sebuah bangsa. Ketika kesalahpahaman diyakini sebagai kebenaran, dan tidak lagi dipertanyakan keabsahannya, maka ia berubah menjadi ideologi, yakni kesadaran palsu yang bertentang dengan kenyataan sebagaimana adanya di dunia. Celaknya, ideologi semacam inilah yang tersebar tidak hanya

¹² See (Wattimena, Yang Indah di dalam Sistem Pendidikan Finlandia, 2017)

di masyarakat Indonesia, tetapi juga di Jerman, Austria dan Swiss sekarang ini.¹³ Gelar sarjana menjadi syarat untuk seseorang, supaya ia bisa dianggap berharga di dalam masyarakat. Ideologi semacam inilah yang kiranya menjadi tantangan utama di dalam mengubah kebijakan pendidikan dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Jika ideologi ini dibiarkan tersebar tanpa tanggapan kritis, maka petaka pendidikan dan ekonomi nasional akan menjadi kenyataan.¹⁴

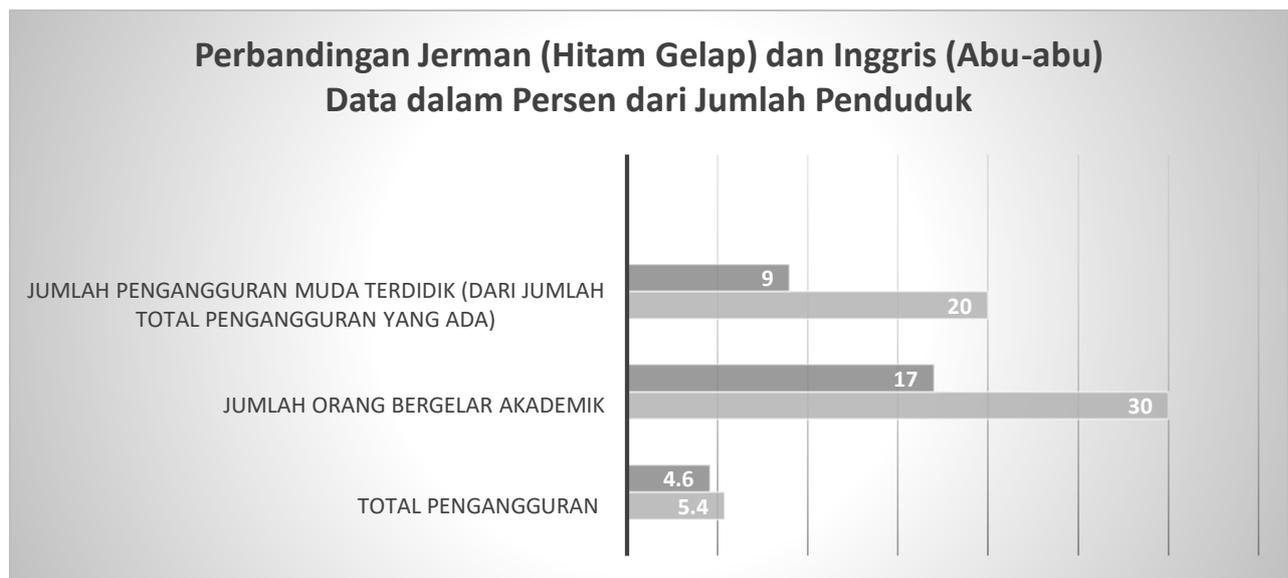
Ideologi ini juga tersebar di tingkat internasional. Jerman, Austria dan Swiss ditekan untuk mengubah sistem pendidikan mereka. Bisa dibayangkan, gerakan akademisasi pendidikan bergelar sarjana ini bergerak bersama arus globalisasi dengan Amerika Serikat dan Inggris sebagai aktor utamanya. Padahal, jika diteliti lebih dalam, sistem pendidikan yang mengedepankan gelar akademik justru tidak berhasil di banyak negara. Salah satu buktinya, seperti sudah disinggung sebelumnya, adalah pengangguran muda terdidik yang justru lebih besar di Inggris dan AS, daripada di Jerman, Austria dan Swiss. Globalisasi, beserta dengan ideologi pendidikan yang disebarnya, hendak memaksakan cara berpikir mereka, walaupun fakta dan data yang ada menunjukkan, bahwa ideologi tersebut justru gagal. Beberapa data ini mungkin bisa menjelaskan lebih dalam.

Di Inggris, jumlah total pengangguran adalah 5,4 persen. Sementara, di Jerman, jumlah total pengangguran yang tercatat adalah 4,6 persen. Dalam hal ini, Jerman memiliki kinerja ekonomi dan kebijakan politik yang lebih baik, daripada Inggris. Padahal, jumlah orang-orang yang bergelar akademik di Inggris lebih banyak, daripada di Jerman. Di Inggris, jumlah orang-orang yang bergelar akademik adalah 30 persen. Sementara, di Jerman 17 persen. Jumlah mahasiswa di Inggris juga lebih tinggi, yakni 64 persen, sementara di Jerman 46 persen. Ini tidak menutupi fakta, bahwa keadaan di Jerman tetap lebih baik terkait dengan jumlah pengangguran terdidik, yakni 9 persen, sementara di Inggris 20 persen. Di Inggris, sampai akhir 2017, tidak ada sistem pendidikan dua model, seperti di Jerman. Menurut Nida-Rümelin, ini merupakan dampak tidak adanya sistem pendidikan keterampilan yang menghubungkan langsung dengan dunia kerja.¹⁵

¹³ Lihat (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

¹⁴ Bdk, (Julian Nida-Rümelin dan Klaus Zierer, 2015)

¹⁵ Data diperoleh dari (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)



Berbagai universitas Eropa terlibat di dalam proses Bologna.¹⁶ Mereka menyamakan kurikulum, sehingga pertukaran pelajar di antara berbagai perguruan tinggi Eropa bisa dimungkinkan, tanpa halangan akademik maupun administratif yang berarti. Walaupun usaha ini bertujuan baik, namun ada kecenderungan untuk menyamaratakan semua proses pendidikan, dan melupakan keunikan keadaan masing-masing negara di dalam menyelenggarakan sistem pendidikannya. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah mahasiswa putus studi di universitas-universitas Eropa. Ini juga terjadi, karena perubahan yang dibuat melalui proses Bologna amatlah besar dan cepat, sehingga tidak cukup waktu bagi banyak universitas, dan juga pemerintah, untuk menyesuaikan diri. Tentu saja, putus studi mahasiswa tidak bisa sepenuhnya dilihat sebagai dampak utama dari proses Bologna, melainkan juga dari semakin lenyapnya paradigma pendidikan sistem dual yang diterapkan di Jerman, sehingga orang berbondong-bondong masuk universitas, hanya karena mengikuti tekanan sosial masyarakat, tanpa memahami kemampuan dan minat dirinya terlebih dahulu.

Masalah lain yang muncul adalah, bahwa lulusan sarjana dari universitas memang tidak disiapkan untuk bekerja. Universitas adalah tempat untuk mengembangkan penelitian ilmiah dan pola berpikir akademik. Ini bukanlah tempat untuk mempersiapkan orang memasuki dunia kerja dengan segala keterampilan yang dibutuhkan, serta tantangan yang ada. Karena belum siap dengan keterampilan dan menghadapi tantangan di dunia kerja,

¹⁶ Lihat (Wattimena, Antara Aku dan Dunia: Uraian dan Tanggapan atas Filsafat Pendidikan Wilhelm von Humboldt di dalam *Theorie der Bildung des Menschen*, 2014)

banyak perusahaan harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada para pegawai baru yang lulus dari universitas. Ini tentu merupakan biaya tambahan bagi banyak perusahaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional yang lebih luas, baik dari biaya pendidikan, beban studi mahasiswa serta biaya pelatihan perusahaan, maka ini merupakan kerugian. Penerapan sistem pendidikan, tanpa memikirkan dampak lebih jauhnya secara kritis, dan hanya mengikuti kecenderungan global, justru akan berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan krisis multidimensi (ekonomi, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, moral) yang berkepanjangan.

Nida-Rümelin kemudian memberikan contoh soal pendidikan guru. Pendidikan guru model pertama hendak memberikan pendidikan teoritis kepada guru, namun dengan lebih banyak penekanan pada pedagogi pendidikan, yakni soal bagaimana guru bisa membangun hubungan yang sehat dalam konteks pendidikan dengan muridnya. Pendidikan guru model kedua adalah sebuah pendidikan akademik tentang guru dan pendidikan, yang juga diikuti dengan penelitian ilmiah, beserta dengan gelar master pendidikan yang kemudian ditempelkan pada lulusannya. Model pendidikan guru yang mana yang lebih tepat untuk menjadi guru di berbagai sekolah yang ada? Jawabannya tentu model pertama. Penelitian ilmiah terkait dengan guru dan pendidikan memang diperlukan. Namun, untuk menjadi seorang pendidik yang berhubungan langsung dengan murid di masyarakat, pengalaman dan pemahaman pedagogik jauh lebih diperlukan, termasuk di dalam empati, kemampuan mengelola stress dan emosi yang muncul. Di Jerman, model pertama ini tidak bergelar akademik, namun mendapatkan pengakuan penuh dari negara (*Ausbildung*). Sementara, model kedua lebih dikenal sebagai ilmuwan pendidikan yang bekerja di universitas untuk melakukan penelitian tentang pendidikan.

Paradigma dan sistem pendidikan, yang hanya mengikuti gelombang globalisasi, akan menciptakan krisis di berbagai unsur kehidupan, mulai dari politik, ekonomi sampai dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, paradigma dan sistem pendidikan sebuah negara harus memiliki arah yang berpijak pada dasar filosofis yang kokoh. Hal inilah kiranya yang dimiliki oleh Jerman, Austria dan Swiss, sebelum gelombang globalisasi dan Amerikanisasi mengancam keutuhan sistem pendidikan mereka. Di Jerman, menurut Nida-Rümelin, kebijakan politik terkait pendidikan, pedagogi dan proses pengajaran tidak bisa dilepaskan dari filsafat pendidikan Jerman, terutama dengan ide kebebasan individual dan otonomi diri

yang dikembangkan oleh Kant, Fichte, Hegel dan terutama oleh Humboldt.¹⁷ Ide dasarnya adalah pendidikan manusia tidak bisa dilepaskan dari pendidikan otonomi diri, yakni kebebasan sekaligus kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan-pilihan hidupnya seturut dengan pertimbangan-pertimbangan akal sehat, dan bukan hanya sekedar mengikuti tradisi ataupun kecenderungan jaman yang ada.

Pendidikan yang berpijak pada pembentukan otonomi diri juga dapat dilihat sebagai pendidikan kepribadian (*Persönlichkeitsbildung*). Hal ini juga merupakan salah satu poin terpenting di dalam filsafat pendidikan Humboldt. Dia jugalah yang menjadi tokoh pendiri sistem sekaligus filsafat pendidikan Jerman di abad 19 lalu. Sebelumnya, pendidikan Jerman berpijak pada upaya untuk membentuk manusia-manusia, guna mengisi lapangan kerja di Jerman yang sedang mengalami revolusi industri. Tujuan utama pendidikan pada kala itu bukanlah pembentukan kepribadian, melainkan mengabdikan pada kepentingan industri yang membutuhkan pekerja yang terampil sekaligus patuh pada perintah, seperti layaknya mesin. Sebagai menteri pendidikan, Humboldt menawarkan cara pandang baru, yakni pendidikan sebagai ruang untuk kebebasan dan pembentukan kepribadian. Ini hanya dapat dilakukan melalui pengembangan pola berpikir ilmiah dan budaya kesetaraan di lingkungan pendidikan, sekaligus investasi pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸

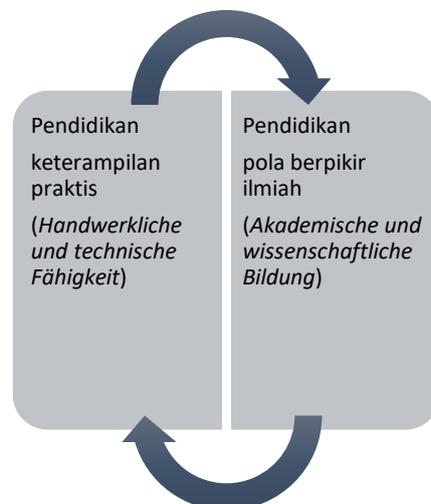
Pandangan ini amatlah revolusioner pada masa itu. Jika pendidikan dilihat sebagai proses pengembangan kepribadian, maka dampaknya tidak hanya terasa di dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu unsur terpenting dari kebebasan, otonomi dan pengembangan kepribadian adalah persoalan tanggung jawab (*Verantwortung*). Ini tentu merupakan hal yang amat penting tidak hanya di dalam dunia kerja, tetapi juga di dalam hidup bermasyarakat secara umum. Pandangan ini diterapkan oleh Humboldt di semua bentuk pendidikan, baik pendidikan keterampilan, maupun pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan berpikir ilmiah. Bagi Humboldt, makna pendidikan lebih dari sekedar pengembangan keterampilan bekerja, atau pengembangan kemampuan berpikir ilmiah.

Walaupun pendidikan lebih luas dari sekedar pendidikan keterampilan maupun pengembangan pola berpikir ilmiah, namun keduanya tetap merupakan unsur penting di dalam pendidikan. Sekarang ini, pendidikan kerap disamakan dengan pendidikan pola

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

berpikir ilmiah. Artinya, pendidikan disempitkan menjadi semata urusan pengembangan intelektual. Humboldt menyanggah pendapat ini. Baginya, pengembangan keterampilan tangan yang bersifat teknis (*handwerkliche Fähigkeit*) juga merupakan bagian penting dari pendidikan. Jika ini dilupakan, ada dua hal yang muncul. Pertama, dunia kerja akan kekurangan orang-orang yang terampil bekerja yang siap mengisi kebutuhan industri. Kedua, dunia pendidikan lalu menciptakan manusia-manusia yang berat sebelah, yakni manusia-manusia yang cerdas secara intelektual dan akademik, namun lemah di dalam soal keterampilan. Menurut Nida-Rümelin, pemahaman tentang pendidikan dua kaki (keterampilan sekaligus kecerdasan ilmiah) inilah kiranya salah satu sumbangan terbesar Humboldt di dalam filsafat pendidikan.



Humboldt juga memberikan kritik tajam terhadap pendidikan yang berpusat pada penilaian terus menerus. Sistem ranking dan sistem lulus-tidak lulus adalah bentuk nyatanya. Ketika sistem ranking diberlakukan, maka akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Ketika sistem lulus dan tidak lulus diberlakukan secara mutlak, maka akan selalu ada pihak yang tidak lulus. Hasilnya adalah masyarakat yang terbelah dua antara yang kalah dan yang menang, serta antara yang lulus dan tidak lulus. Masyarakat semacam ini adalah masyarakat feodalistik yang tidak sesuai dengan salah satu nilai utama masyarakat demokrasi modern, yakni kesetaraan.¹⁹ Pada tingkat yang lebih luas, masyarakat semacam ini dapat

¹⁹ Lihat (Wattimena, *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*, 2016)

disebut sebagai masyarakat yang tidak manusiawi, karena mendiamkan dan bahkan mendukung berbagai tindakan memecah belah antara manusia. Padahal, menurut Humboldt, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan kesetaraan sosial di dalam masyarakat, sehingga kesenjangan di dalam berbagai bentuknya bisa dikurangi, bahkan dihilangkan.²⁰ Masyarakat yang setara adalah masyarakat yang terdiri dari orang yang memiliki minat serta bakat yang berbeda-beda, namun masing-masing orang mampu mengembangkan diri, serta mendapatkan pengakuan yang selayaknya dari masyarakat secara luas.

Tentang ini, Nida-Rümelin menulis,

“Ketika kita memiliki berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan kita, dan ketika keseimbangan, nilai yang sama, sebuah budaya dari pengakuan yang sama telah diterapkan, maka setiap orang bisa menjalani jalan dan menemukan pengakuan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang orang lain anggap bagus, dan disanalah terletak kompetensi kognitif. Semakin sebuah sistem pendidikan bersifat seragam, semakin tidak manusiawilah sistem pendidikan tersebut. Yang dibutuhkan adalah keberagaman. Pengakuan terhadap jalan-jalan non akademik di dalam hidup dan pekerjaan sudah tersebar di Eropa Tengah dan di banyak negara lainnya. Namun, mengapa jalan ini harus kita tinggalkan?”²¹

Pemerintah dan masyarakat luas harus memberikan pengakuan penuh terhadap proses pendidikan maupun jalan hidup yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan ilmiah ataupun akademik. Hanya dengan beginilah cita-cita masyarakat yang berpijak pada kesetaraan sosial bisa diwujudkan.

Dari dekade 1970-an sampai dekade 2000-an awal, Jerman menerapkan sistem pendidikan dual dengan cukup konsisten. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi relatif tetap, dan jumlah murid yang mengikuti program keterampilan kerja juga tetap. Kecenderungan ini berubah sejak 2006. Jumlah murid yang tertarik memasuki perguruan tinggi meningkat. Sementara, jumlah peserta program keterampilan kerja menurun. Di beberapa kota di Jerman,

²⁰ Lihat (Wattimena, Yang Indah di dalam Sistem Pendidikan Finlandia, 2017)

²¹ (Nida-Rümelin, *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*, 2016)

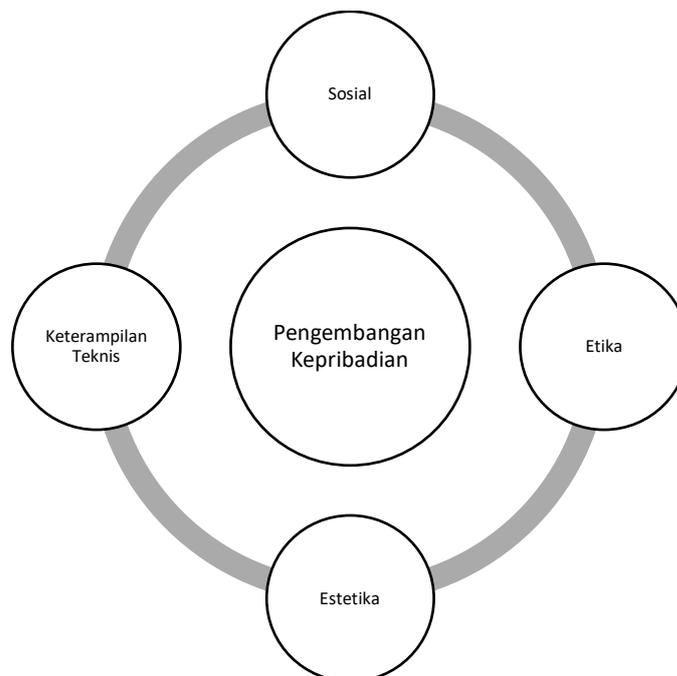
program ini sama sekali tidak memiliki peminat, sehingga hampir ditutup. Ada dua unsur yang berpengaruh. Pertama, tekanan globalisasi yang menuntut penyamarataan pendidikan di negara-negara Eropa dan AS, sehingga peminat untuk memasuki program keterampilan kerja berkurang. Dua, tersebarnya pandangan di masyarakat, bahwa program pendidikan universitas jauh lebih prestisius, daripada program pelatihan kerja. Pandangan ini juga ditopang oleh kesalahpahaman yang tersebar di masyarakat, bahwa lulusan universitas menerima gaji lebih tinggi daripada yang non lulusan universitas, atau yang mengikuti program keterampilan kerja. Jika peserta program pelatihan kerja menurun, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka ini merupakan akhir dari sistem pendidikan dual di Jerman yang justru sudah terbukti keberhasilannya.

Seperti sudah disinggung sedikit sebelumnya, ketika jumlah mahasiswa di universitas bertambah, karena pengaruh trend dan ideologi pendidikan bergelar semata, maka mutu pendidikan akademik juga akan terpengaruh. Biaya pendidikan tinggi akan meningkat, sementara mutu juga tidak dapat dijamin, karena tidak terkontrolnya jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya jumlah mahasiswa putus studi di universitas, karena mereka mengambil bidang yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, melainkan karena pengaruh tekanan sosial dan globalisasi semata. Di sisi lain, tidak mungkin menolak seseorang untuk memasuki perguruan tinggi, karena pendidikan yang layak adalah unsur penting dari hak-hak asasi manusia seseorang. Semua keadaan ini bisa mempengaruhi mutu penelitian ilmiah dan pendidikan akademik di perguruan tinggi, terutama karena mahasiswa yang memang berbakat dan berminat di penelitian ilmiah tidak bisa mendapatkan dukungan yang sepenuhnya, karena keterbatasan sumber daya yang ada, guna melayani membludaknya jumlah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Keterkaitan antara berbagai hal ini perlu diperhatikan di dalam membuat kebijakan pendidikan yang tepat.

Yang juga perlu diciptakan, menurut Nida-Rümelin, adalah budaya saling menghormati di dalam dunia pendidikan. Budaya ini terwujud di dalam pengakuan yang setara dari negara dan masyarakat luas terhadap pendidikan akademik maupun pendidikan keterampilan kerja. Walaupun memiliki perbedaan tujuan, kedua bentuk pendidikan ini diikat oleh nilai yang sama, yakni pengembangan kepribadian secara menyeluruh sebagai manusia.²² Artinya, semua unsur di dalam diri manusia dikembangkan, termasuk di dalamnya

²² Lihat (Wattimena, Pendidikan Manusia-Manusia Demokratis: Noam Chomsky dan Indonesia, 2012)

adalah unsur sosial, unsur estetika, unsur etika dan unsur keterampilan teknis. Semua unsur tersebut harus dirajut di dalam beragam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Ini memang sesuatu yang amat sulit untuk dilakukan. Beragam kepentingan selalu menghadang terciptanya pendidikan yang berpijak pada upaya pengembangan kepribadian yang menyeluruh, mulai dari kepentingan ekonomi, kepentingan religius sempit, kepentingan ideologi politik dan sebagainya. Namun, upaya ini amat penting untuk dilakukan.



Tanggapan dan Relevansi untuk Indonesia

Ada tiga hal yang kiranya perlu diperhatikan. *Pertama*, Nida-Rümelin memberikan sumbangan besar bagi pemahaman kita tentang tersebarnya ideologi pendidikan di dalam dunia pendidikan sekarang ini. Ideologi adalah kesadaran palsu tentang kenyataan yang ada, atau pemahaman yang tidak berjalan searah dengan kenyataan sebagaimana adanya. Di dalam dunia pendidikan, ideologi yang tersebar adalah pemahaman, bahwa pendidikan akademik bernilai lebih tinggi, daripada pendidikan non akademik, atau pendidikan keterampilan kerja. Semua data yang ada menunjukkan, bahwa hal ini tidaklah tepat.

Guna melampaui ideologi pendidikan tersebut, maka diperlukan sebuah paradigma pendidikan yang baru. Di dalamnya terdapat pemahaman, bahwa pendidikan akademik dan non akademik, sejatinya, adalah setara. Pemahaman ini lalu diterjemahkan ke dalam

pengakuan resmi dari pemerintah dan masyarakat luas terhadap kesetaraan pendidikan ini. Pengakuan ini akan berdampak luas tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mutu keseluruhan dari hidup warga negara tersebut.

Dunia pendidikan Indonesia tentu bisa banyak belajar tentang hal ini. Pendidikan keterampilan kerja masih menjadi anak tiri di Indonesia, karena sebagian besar warganya masih terjebak pada ideologi pendidikan, bahwa pendidikan akademik lebih bernilai, baik secara ekonomi maupun secara sosial, di mata masyarakat. Akibatnya, orang tua berlomba-lomba memasukkan anak ke universitas, guna mendapatkan pendidikan, walaupun itu memakan waktu dan biaya yang amat tinggi. Ketika lulus, mereka juga belum siap memasuki dunia kerja, karena universitas memang bukan tempat untuk mempersiapkan orang memasuki dunia kerja. Ini tentu tidak efektif dan efisien dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara luas, dengan demikian, perlu untuk memberikan pengakuan resmi terhadap pendidikan keterampilan kerja, atau pendidikan non akademik. Pengakuan ini lalu diikuti dengan penciptaan sistem pengupahan yang layak bagi lulusan kedua jenis pendidikan yang ada. Yang juga diperlukan adalah kesempatan bagi semua warga untuk melanjutkan pendidikan seumur hidupnya. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia secara luas membutuhkan perubahan pemahaman yang mendasar tentang pendidikan, baik dari segi filsafatnya, maupun dari segi sistem yang ada.

Walaupun begitu, harus juga diperhatikan, supaya pola berpikir ini tidak jatuh ke dalam ideologi baru, yakni ideologi pendidikan dual. Keadaan nyata di tingkat nasional maupun internasional harus terus menjadi perhatian utama di dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kaitan antara kebijakan pendidikan dengan kebijakan ekonomi politik lainnya tetap harus diperhatikan. Akal kritis beserta pertimbangan hati nurani terhadap masa depan peserta didik harus tetap menjadi tolok ukur utama, sehingga pandangan apapun, walaupun bermutu tinggi, tidak jatuh ke dalam ideologi yang bertentangan dengan kenyataan sebagaimana adanya.



Kedua, Nida-Rümelin mengajak kita untuk bersikap kritis terhadap arus globalisasi di bidang pendidikan. Arus ini ingin menciptakan pendidikan yang seragam untuk semua negara, tanpa memperhatikan secara jeli keunikan budaya masing-masing negara yang ada. Arus ini juga ingin menyempitkan pendidikan semata untuk mengabdikan kepentingan industri global yang berkembang pesat. Pola pendidikan global semacam ini, menurutnya, justru menurunkan mutu pendidikan, sekaligus memperlemah pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional.

Di Indonesia, sikap kritis semacam ini masih sangatlah jarang ditemukan. Dunia pendidikan Indonesia masih mengikuti arus globalisasi pendidikan, tanpa sikap kritis dan akal sehat. Pendidikan pun disempitkan melulu sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bisnis dan industri. Dalam hal ini, Indonesia kiranya perlu belajar dari filsafat pendidikan Nida-Rümelin.

Walaupun pendidikan lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan dunia bisnis dan industri, namun kebutuhan dua bidang kehidupan tersebut tidak boleh dilupakan. Pendidikan tidak boleh terjebak pada menara gading yang tercabut dari pergulatan kehidupan manusia di dunia nyata. Dunia bisnis dan industri bisa menjadi rekan penting di dalam pengembangan dunia pendidikan secara global. Di dalam dunia bisnis dan industri, unsur-unsur penting kehidupan, seperti kemanusiaan, kepemimpinan dan solidaritas, juga bisa dikembangkan secara efektif dan efisien.

Tiga, Nida-Rümelin melihat pentingnya pendidikan dipahami sebagai upaya pengembangan kepribadian. Dalam hal ini, pendidikan hendak mengembangkan semua unsur di dalam diri manusia, mulai dari unsur etis, sosial sampai dengan estetik. Pola pendidikan semacam ini akan menciptakan warga negara yang cerdas sekaligus manusiawi. Dengan ciri kepribadian semacam ini, kemakmuran ekonomi di sebuah masyarakat pun bisa dengan mudah terwujud.

Di Indonesia, dunia pendidikan dihancurkan oleh formalisme agama.²³ Artinya, pendidikan disempitkan melulu menjadi pendidikan nilai-nilai agamis yang hanya mengedepankan pemahaman dangkal semata, seperti beragam larangan sekaligus ritual-ritual, tanpa makna. Akibatnya, banyak unsur kepribadian peserta didik tidak berkembang. Kecerdasan dan kepekaan hati nurani di dalam menyingkapi berbagai keadaan yang terjadi pun tidak bertumbuh. Indonesia jelas harus melakukan perubahan besar dalam hal ini.

Namun, pemahaman tentang pribadi di dalam filsafat Nida-Rümelin pun tetap harus ditanggapi secara kritis. Konsep pribadi yang dikembangkannya amat kuat tertanam di dalam tradisi liberalisme Eropa yang amat menekankan kebebasan individual, bahkan kerap kali mengabaikan kebaikan bersama.²⁴ Jika ini tidak diperhatikan, konsep otonomi diri dan kebebasan pribadi amat mudah terpeleket menjadi egoisme dan individual ekstrem yang mengancam kepentingan bersama. Pemahaman tentang pribadi yang bebas namun terikat dalam hubungan dengan lingkungannya kiranya tetap perlu dikembangkan.

Kesimpulan

Tantangan utama pengembangan pendidikan di dunia dewasa ini dapat dibagi menjadi dua, yakni ideologi pendidikan yang melahirkan obsesi pada gelar akademik, dan arus globalisasi pendidikan yang menyempitkan pendidikan menjadi semata pengabdian kepentingan bisnis serta industri. Untuk menanggapi kedua tantangan pendidikan global tersebut, Julian Nida-Rümelin, filsuf dan mantan menteri kebudayaan Jerman, menawarkan pandangan dual pendidikan, yakni pendidikan yang berfokus pada keterampilan kerja (*Berufsausbildung*) dan pendidikan akademik (*akademische Bildung*). Keduanya perlu mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan masyarakat luas. Pola pendidikan pertama berfokus pada pemenuhan kebutuhan lapangan kerja. Sementara, pola pendidikan kedua berfokus pada pemenuhan kebutuhan peneliti ilmiah, guna pengembangan ilmu pengetahuan di universitas. Walaupun memiliki fokus yang berbeda, keduanya perlu memiliki filsafat dasar yang sama, yakni pendidikan sebagai pengembangan kepribadian (*Persönlichkeitsbildung*) yang menyeluruh. Semua hal ini amatlah penting diperhatikan tidak hanya dalam konteks pengembangan pendidikan di Uni Eropa dan AS, tetapi juga untuk Indonesia.

²³ Lihat (Deutsche Welle, 2017)

²⁴ Lihat, (Magnis-Suseno, 2006)

Daftar Pustaka

- (2012). Diambil kembali dari The Economics of the Great Gatsby Curve: a picture is worth a thousand words: <https://mileskorak.com/2012/01/18/the-economics-of-the-great-gatsby-curve-a-picture-is-worth-a-thousand-words/>
- (2017). Diambil kembali dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/romo-magnis-pendidikan-budaya-di-indonesia-dihabisi-oleh-formalisme-agama/a-40840690>
- Hardiman, F. B. (1988). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Kanisius.
- Julian Nida-Rümelin dan Klaus Zierer. (2015). *Die neue deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten*. Freiburg.
- Magnis-Suseno, F. (2006). *Pijar-pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nida-Rümelin, J. (2013). *Philosophie einer humanen Bildung*. Körber Stiftung.
- Nida-Rümelin, J. (2016). *Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung*. Profil.
- OECD Data. (2016). Diambil kembali dari <https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rates-by-education-level.htm#indicator-chart>
- Wattimena, Reza A.A. (2012). Pendidikan Manusia-Manusia Demokratis: Noam Chomsky dan Indonesia. *Jurnal Arete, Vol. 1 no. 2*.
- Wattimena, Reza A.A. (2014). Antara Aku dan Dunia: Uraian dan Tanggapan atas Filsafat Pendidikan Wilhelm von Humboldt di dalam Theorie der Bildung des Menschen. *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion, Vol 3, No 2*.
- Wattimena, Reza A.A. (2015). *Filsafat sebagai Revolusi Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, Reza A.A. (2016). *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, Reza A.A. (2017). *Yang Indah di dalam Sistem Pendidikan Finlandia*. Diambil kembali dari Rumah Filsafat: <https://rumahfilsafat.com/2017/11/16/yang-indah-di-dalam-sistem-pendidikan-finlandia/>
- Žižek, S. (1989). *The Sublime Object of Ideology*. Verso.